



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UPK BATU BATIKAM
KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah
Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam*

Oleh:

DESRI ASRIANI

14 231 013

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desri Asriani
NIM : 14 231 013
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kinerja Keuangan Pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.**" adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2019
Saya yang menyatakan,



Desri Asriani
NIM. 14 231 013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **DESRI ASRIANI, NIM: 14 231 013** dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UPK BATU BATIKAM KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR”, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

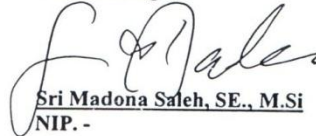
Batusangkar, 21 Januari 2019

Pembimbing I



Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 197406232000032002

Pembimbing II



Sri Madona Saleh, SE., M.Si
NIP. -

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **DESRI ASRIANI**, NIM. 14 231 013, dengan judul “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UPK BATU BATIKAM KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**” telah diujikan dalam Sidang *Munqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP. 19740623 200003 2 002	Ketua Sidang		22/2/19.
2	Sri Madona Saleh, SE., M.Si NIP. -	Sekretaris Sidang		22/2/19
3	Gampito, SE., M.Si NIP. 19670219 200501 1 005	Anggota I		20/2-19
4	Yeni Melia, MM NIP. 19850505 201503 2 005	Anggota II		20/2/19.

Batusangkar, 22 Februari 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

DESRI ASRIANI, NIM 14 231 013, judul skripsi “**Analisis Kinerja Keuangan Pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar**”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya penurunan laba pada UPK Batu Batikam pada Tahun 2017, jadi bagaimana kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum berdasarkan aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum. Penilaian kinerja keuangan ini dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan pinjaman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan UPK Batu Batikam, berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan laporan kolektibilitas UPK Batu Batikam. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dilihat dari aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman berdasarkan nilai kesehatan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dilihat dari kategori kesehatan UPK dikatakan sehat lebih dari 75, cukup sehat antara 60-75 dan tidak sehat kurang dari 60. Maka nilai kesehatan yang diperoleh oleh UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sebesar 63,54 yang mana dikategorikan cukup sehat.

Kata kunci: UPK, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR KEASLIAN DATA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian Dan Luaran Penelitian	6
G. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kinerja Keuangan	8
1. Pengertian Kinerja.....	8
2. Pengertian Kinerja Keuangan	9
3. Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan	9
4. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (<i>solution</i>) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan (Fahmi, 2012:240-241). Pengukuran Kinerja Keuangan	10
5. Evaluasi Kinerja Keuangan.....	10
6. Perbaikan Kinerja.....	11
B. Laporan Keuangan.....	11
1. Pengertian Laporan Keuangan	11
2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	12
3. Unsur-unsur Laporan Keuangan	14

4. Tujuan Laporan Keuangan.....	16
5. Jenis-Jenis Laporan Keuangan.....	17
C. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Perdesaan (MP)	18
1. Pengertian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)	18
2. Prinsip Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).....	18
3. Bentuk Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).....	19
4. Administrasi Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)	20
5. Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK).....	22
6. Penilaian Kesehatan UPK	23
D. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	35
1. Pengertian SPP	35
2. Tujuan SPP.....	35
3. Ketentuan Kelompok SPP.....	36
4. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan	36
E. Penelitian Relevan	37
F. Kerangka Berfikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Sejarah UPK Kecamatan Lima Kaum	48
1. Sejarah UPK Lima Kaum	48
2. Visi dan Misi UPK Lima Kaum.....	49
3. Struktur Organisasi UPK Lima Kaum	50
B. Pembahasan	51
1. Aspek Pengelolaan Keuangan.....	51
2. Aspek Pengelolaan Pinjaman.....	58
3. Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan	62

4. Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman	65
5. Nilai Kesehatan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)	66
6. Lembar Kategori Kesehatan UPK.....	67
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi	71
C. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Laba Rugi UPK Kecamatan Lima Kaum.....	
Tabel 2.1 Penetapan Prediksi Tingkat Kesehatan UPK.....	34
Tabel 3.1 Lembar Nilai Kesehatan UPK	46
Tabel 3.2 Lembar Kategori Kesehatan UPK.....	47
Tabel 4.1 BLM Yang Dikelola UPK Batu Batikam.....	48
Tabel 4.2 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan.....	1
Tabel 4.3 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan.....	3
Tabel 4.4 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan.....	4
Tabel 4.5 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan.....	5
Tabel 4.6 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan.....	7
Tabel 4.7 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan.....	8
Tabel 4.8 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman.....	8
Tabel 4.9 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman.....	9
Tabel 4.10 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman.....	0
Tabel 4.11 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman.....	0
Tabel 4.12 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan.....	2
Tabel 4.13 Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman.....	5
Tabel 4.14 Lembar Nilai Kesehatan UPK.....	

Tabel 4.15 Lembar Kategori Kesehatan UPK..... 6
7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 8

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum..... 0

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Posisi Keuangan	6
Lampiran 2 Laporan Laba Rugi.....	9
Lampiran 3 Laporan Kolektibilitas Pinjaman.....	0
Lampiran 4 Buku Kas SPP.....	2
Lampiran 5 Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tahun.....	3
Lampiran 6 Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	04
Lampiran 7 Surat izin Penelitian.....	05
Lampiran 8 Surat Persetujuan Pembimbing.....	06
Lampiran 9 Surat Keterangan Kesbangpol	07

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan. Pengertian kemiskinan sendiri sebagai suatu konsep ilmiah lahir sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Karena itu dalam setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Kemiskinan di pandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang selanjutnya disebut DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) adalah dana program yang bersifat bansos atau dana hibah dengan pemilik masyarakat di Kecamatan setempat, bukan lagi dana milik Pemerintah. PNPM berakhir pada 31 Desember 2014 dan ditindak lanjuti dengan proses pengakhiran program yang difasilitasi oleh fasilitator atau konsultan dari 1 Juli hingga 31 Oktober 2015.

Dana bergulir mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek perhimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator penyangkupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Rivai, 2011: 239).

Kinerja keuangan dapat di nilai dengan melakukan analisis laporan keuangan, dimana analisis keuangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan

besar tetapi dilakukan pula untuk semua skala usaha baik usaha kecil, usaha menengah, dan termasuk pula Unit Pengelola Kegiatan (UPK), analisis laporan keuangan akan memberikan nilai yang lebih lengkap dan sempurna, apakah sebuah Unit Pengelola Kegiatan tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat atau tidak sehat. Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi kegiatan finansial untuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kegiatan dimasa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Analisis rasio adalah alat analisis yang digunakan dalam menjelaskan hubungan dari data keuangan, yaitu dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Analisis rasio dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat/ menganalisis tentang kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan Petujuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) UU No. 6 Tahun 2014, jenis-jenis laporan keuangan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) ada tiga, yaitu:

- a. Laporan arus dana
- b. Neraca/neraca microfinance
- c. Laporan operasional keuangan UPK/laba

Berdasarkan penjelasan Petujuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd), kinerja keuangan adalah melakukan penilaian sistem atau aturan pengelolaan keuangan yang mencakup proses perencanaan, pelaporan dan hasil (*performance*) pengelolaan. Dalam penilaian aspek ini menekankan kesiapan UPK dalam mengelola keuangan program apapun atau proyek apapun di kemudian hari, karena penilaian didasarkan pada pengelolaan transaksi keuangan yang normatif dengan standar minimal, yang dapat dinilai dari dua aspek, yaitu aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan pinjaman.

Pada aspek pengelolaan keuangan ini terdapat enam rasio keuangan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Rasio Pendapatan

- b. Rasio Biaya
- c. Rasio Laba/Surplus
- d. Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana
- e. Rasio Risiko Pinjaman
- f. Rasio Alokasi Laba/Surplus

Aspek yang ke dua adalah aspek pengelolaan pinjaman. Pada aspek ini terdapat empat rasio keuangan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Rasio Pertumbuhan Pemodalan
- b. Rasio Pertumbuhan Kelompok
- c. Rasio Tingkat Pengembalian
- d. Rasio Risiko Pinjaman / Kolektibilitas Pinjaman (Petunjuk Teknis

Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd), 2014: 42-53).

Unit Pengelola Kegiatan ini berdiri pada tahun 2007 yang mana modal awal Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini bersumber dari dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Batu Batikam di Kecamatan Lima Kaum merupakan lembaga simpan pinjam untuk masyarakat desa. Simpan pinjam ini dikhususkan untuk warga yang tinggal di Kecamatan Lima Kaum. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri maupun meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk kelompok perempuan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat desa yang membutuhkan dana untuk usaha sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Tabel 1.1
Laporan Laba Rugi
UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum
Tahun 2015-2017

Keterangan	2015	2016	2017
Pendapatan Operasional	Rp. 493.525.200	Rp. 526.595.200	Rp. 549.081.000
Pendapatan Non Operasional	Rp. 2.341.339	Rp. 2.074.749	Rp. 1.404.660
Total Pendapatan	Rp. 495.866.539	Rp. 528.669.949	Rp. 550.485.660
Biaya Operasional	Rp. 221.145.133	Rp. 236.581.067	Rp. 267.887.100
Biaya Non Operasional	Rp. 453.126	Rp. 399.814	Rp. 313.028
Total Biaya	Rp. 221.598.259	Rp. 236.980.881	Rp.268.200.128
LABA	Rp. 274.268.280	Rp. 291.689.068	Rp. 282.285.532

Sumber: *Laporan Keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum*

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terlihat bahwa UPK Batu Batikam mengalami penurunan laba yaitu sebesar Rp. 9.403.536 sedangkan pada tahun sebelumnya UPK Batu Batikam mengalami kenaikan laba. Untuk pendapatan operasional pada tahun 2017 UPK Batu Batikam mengalami kenaikan seperti tahun sebelumnya. Penurunan laba tersebut disebabkan oleh pendapatan non operasional yang mengalami penurunan yaitu dari Rp. 2.074.749 pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.404.660 pada tahun 2017. Selain pendapatan non operasional yang mengalami penurunan, penurunan laba UPK Batu Batikam juga disebabkan oleh kenaikan biaya operasionalnya.

Dari uraian di atas penulis ingin melihat bagaimana kinerja keuangan UPK pada tahun 2017 yang menyebabkan laba tersebut menurun. Sehingga dari penjelasan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan, apakah kinerja keuangan UPK pada tahun 2017 dikategorikan baik, cukup atau kurang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**Analisis Kinerja Keuangan pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dilihat dari aspek pengelolaan keuangan.
2. Kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dilihat dari aspek pengelolaan pinjaman.
3. Perbandingan penilaian kinerja UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dilihat dari aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman.
4. Kinerja UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2017 mengalami penurunan laba dari tahun 2016.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dilihat dari aspek pengelolaan keuangan.
2. Kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dilihat dari aspek pengelolaan pinjaman.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dari aspek pengelolaan keuangan?
2. Bagaimana kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dari aspek pengelolaan pinjaman?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar berdasarkan aspek pengelolaan keuangan.

2. Untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar berdasarkan aspek pengelolaan pinjaman.

F. Manfaat Penelitian Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SE pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar.
- 2) Untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang bagaimana kinerja keuangan pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum.

b. Bagi Akademik untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Bagi UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum.

- 1) Sebagai dasar pertimbangan UPK dalam menentukan kebijakan yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
- 2) Membantu UPK untuk mengetahui penilaian kinerja seperti apa yang bagus diterapkan dalam laporan keuangan.

d. Bagi Pihak Lain

Memberikan manfaat sebagai bahan bacaan atau referensi untuk memberikan gambaran yang jelas dan informasi akuntansi mengenai kinerja keuangan pada UPK.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai jurnal agar dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya.

G. Defenisi Operasional

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau forum Masyarakat Antar Desa (MAD) prioritas usulan dan berfungsi membantu pengelolaan kegiatan termasuk menyalurkan dana bantuan masyarakat dalam PNPM. Dalam melaksanakan kegiatannya UPK bertanggung jawab terhadap forum masyarakat antar desa sebagai wakil masyarakat se Kecamatan, UPK tidak lagi hanya sebagai kasir (juru bayar) namun lebih dari itu juga ikut bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya semua kegiatan PNPM dikecamatan.

Aspek pengelolaan keuangan adalah melakukan penilaiam sistem atau aturan pengelolaan keuangan yang mencakup proses perencanaan, pelaporan dan hasil pengelolaan. Dalam penilaian aspek ini menekankan kesiapan UPK dalam mengelola keuangan program apapun atau proyek apapun dikemudian hari, karena penilaian didasarkan pada pengelolaan transaksi keuangan yang normative dengan standar minimal.

Aspek pengelolaan pinjaman adalah melakukan penilaian sistem atau aturan perguliran, kondisi permodalan dan hasil pengelolaan pinjaman. Hasil penilaian aspek ini memberikan indikasi tentang kesiapan UPK dalam mengelola kegiatan pinjaman baik secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat diketahui prospek pinjaman yang dikelola pada masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Rivai, 2010: 548).

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi itu bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Fahmi, 2013: 2).

Dalam artian lain kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal yakni tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi (Lestari, 2016: 12-13).

Jadi kinerja merupakan suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki (Rivai, 2010:604).

Manfaat dari penilaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur prestasi yang di capai organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- 2) Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- 3) Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- 4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi.
- 5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal.

2. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecakupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Rivai, 2011:239).

Kinerja keuangan menurut Irham Fahmi adalah analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar seperti membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK 9 (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya (Fahmi, 2012:239).

3. Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan

Tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum yaitu :

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
- b. Melakukan perhitungan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

d. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

4. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan (Fahmi, 2012:240-241).

Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran terhadap kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara:

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi.
2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan.
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja (Fahmi, 2012: 3-4).
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatian.
5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas.
6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya.
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan (Wibowo, 2011:229).

5. Evaluasi Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja keuangan dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penelitian, review dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang (Wibowo, 2011:261).

6. Perbaikan Kinerja

Kinerja individu, tim, atau organisasi dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, namun dapat pula tidak mencapai harapan. Perbaikan terhadap kinerja harus dilakukan karena prestasi kerja yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Dengan melakukan perbaikan kinerja, diharapkan tujuan organisasi dimasa depan dapat dicapai dengan lebih baik lagi. Namun perbaikan kinerja tidak hanya dilakukan apabila prestasi kerja tidak seperti yang diharapkan. Perbaikan kinerja harus pula dilakukan walaupun seseorang, tim atau organisasi telah mampu mencapai prestasi kerja yang diharapkan karena organisasi, tim maupun individu dimasa depan dapat menetapkan target kuantitatif yang lebih tinggi (Wibowo, 2011:277).

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi (Fahmi, 2012:2).

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan secara umum dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi keuangan perusahaan terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi) (Kasmir, 2010:66).

Menurut Syaiful Bahri laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan yang dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan (Bahri, 2016:134) .

Sedangkan menurut Novi Priyanti laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan, pengelolaan dan pemeriksaan dari transaksi finansial dalam suatu usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan baik dalam perusahaan mengenai proses keuangan dan hasil usaha perusahaan (Priyanti, 2013:5). Dilihat dari segi keuangan, laporan keuangan yang dibuat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis jalannya suatu perusahaan. Apakah mengalami kemajuan-kemajuan atau sebaliknya dan walaupun mengalami kemajuan apakah keberhasilan itu sudah optimal atau belum (Nurhayati, 2015:97).

Posisi keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan itu didapat. Perubahan posisi keuangan menunjukkan kemajuan perusahaan, memberikan gambaran tentang apakah perusahaan memperoleh laba dalam melaksanakan kegiatannya dan apakah perusahaan mengalami perkembangan yang menunjukkan manajemen telah mengelola perusahaan dengan berhasil. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi suatu kesatuan usaha. Laporan ini diperlukan oleh pihak yang berkepentingan antara lain manajer perusahaan, pemilik perusahaan, bankir, kreditur, investor, pemerintah dan lembaga lain (Sadeli, 2011:18).

2. **Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dapat dipahami.

Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. Relevan

Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang.

3. Keandalan/*Reabilitas*

Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tetap.

4. Dapat dibandingkan/*Komparabilitas*

Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

5. Netral

Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.

6. Tepat waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkan informasi tersebut.

7. Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya (Putra, 2013:11).

3. Unsur-unsur Laporan Keuangan

a. Aset

Menurut *Accounting Principles Board (APB) Statement*, aset merupakan kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk didalamnya pembebanan yang ditunda yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan menurut *Financial Accounting Standard Board (FASB)*, asset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu (Harahap, 2011:209-210).

b. Hutang

Hutang adalah semua kewajiban keuangan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Untuk utang-utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek. Sementara utang-utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari setahun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang (Samryn, 2012: 38-39).

c. Modal

Modal atau harta bersih adalah hak yang dimiliki oleh pengelola setelah semua kewajibannya selesai dibayar. Hubungan antara harta, utang, dan modal bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Harta} = \text{Utang} + \text{Harta Bersih}$$

Atau,

$$\text{Harta Bersih} = \text{Harta} - \text{Utang}$$

Harta bersih sering juga disebut sebagai harta pemilik (Margareta, 2011:10).

d. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktifitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih untuk kepentingan pihak ketiga, seperti pajak pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, bukan merupakan manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas (DSAK IAI, 2014:23.2)

Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi atau peristiwa lain yang sama diakui secara bersamaan, proses ini biasanya mengacu pada pengaitan pendapatan dengan beban. Beban termasuk garansi dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang , biasanya dapat di ukur secara andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan telah dipenuhi. Akan tetapi, pendapatan tidak diakui jika beban yang berkaitan tidak dapat diukur secara andal. Dalam keadaan tersebut, setiap imbalan yang diterima untuk penjualan barang tersebut diakui sebagai liabilitas (DSAK IAI, 2014:23.4).

Pendapatan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha adalah pendapatata yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan. Pendapatan usaha terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa.

b. Pendapatan di luar usaha

Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari hasil kegiatan pokok, perusahaan juga memperoleh pendapatan sampingan yang dapat berupa: pendapatan bunga,

pendapatan deviden, pendapatan sewa dan sebagainya (Bahri, 2016:137).

e. Beban

Beban adalah arus kas keluar. Hal tersebut disebabkan oleh pembelian barang, jasa, atau pembayaran aktivitas lain yang mendatangkan keuntungan, misalnya gaji karyawan, biaya perolehan, administrasi, biaya operasional, dan lain-lain (Margaretha, 2011:12).

Beban biasanya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Beban usaha

Beban usaha adalah semua beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan usaha.

b. Beban di luar usaha

Beban di luar usaha adalah mencakup beban-beban yang digunakan untuk kegiatan di luar kegiatan pokok atau utama perusahaan. Contoh: beban bunga dan beban lain-lain (Bahri, 2016:137-138).

4. **Tujuan Laporan Keuangan**

Sedangkan Kasmir merumuskan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada suatu periode tertentu.

- e. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan Informasi keuangan lainnya (Kasmir, 2010:87).

5. **Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Berdasarkan penjelasan Petujuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) UU No. 6 Tahun 2014, jenis-jenis laporan keuangan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) ada tiga, yaitu:

d. Laporan arus dana

Adalah laporan yang menggambarkan tentang sumber, pengguna dan perubahan dana dalam satu periode tertentu. Yang dimaksud sumber dana disini adalah semua dana yang masuk ke UPK selain dana bergulir seperti BLM dan DOK , termasuk juga penerimaan bunga bank dari rekening BLM Dan rekening DOK.

Penggunaan dana adalah setiap pengeluaran dana yang terkait dengan penyaluran BLM ke desa, penyaluran BLM menjadi operasional UPK serta seluruh penggunaan dana DOK, termasuk pengeluaran pajak dan administrasi bank yang timbul pada rekening BLM dan DOK. Sedangkan perubahan dana adalah perubahan posisi saldo awal dan saldo akhir dana karena adanya transaksi (dana masuk dan dana keluar) yang terjadi dalam periode tertentu.

e. Neraca/neraca microfinance

Adalah laporan yang menjelaskan posisi keuangan UPK per tanggal tertentu (akhir bulan atau akhir tahun/ DesemberXX).

f. Laporan operasional keuangan UPK/ laba rugi UPK

Adalah laporan yang menggambarkan pendapatan dari pengembalian jasa pinjaman, bunga bank yang diterima, dan lain-lain serta biaya operasional/non operasional UPK yang terjadi selama satu

periode (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, 2012:44-51).

C. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Perdesaan (MP)

1. Pengertian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat penerima manfaat. Dana ini dikelola dibawah kerangka kebijakan PNPM mandiri. Nama DAPM digunakan sebagai pengganti dana bergulir masyarakat (SPP, UEP dan sebagainya), sebagai penegasan bahwa dana ini adalah milik masyarakat. Peran Pemerintah dalam hal ini adalah membina agar dana bagi warga miskin tersalurkan dengan tepat, serta tidak hilang fungsi social. DAPM ini juga untuk membedakan dengan lembaga pengelola dana bergulir yang mengelola dana pemerintah dibawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Keuangan yang milik Negara.

2. Prinsip Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Pengelolaan DAPM ini menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia
- b. Otonomi
- c. Berorientasi pada masyarakat miskin
- d. Partisipasi
- e. Kesetaraan dan keadilan gender
- f. Demokratis
- g. Transparan dan akuntabel
- h. Prioritas
- i. Kolaborasi
- j. Keberlanjutan dan sederhana

Keberhasilan DAPM selama ini adalah karena keberadaannya yang tersebar diseluruh Kecamatan, persyaratan yang mudah dipenuhi oleh masyarakat dalam perkembangannya DAPM selanjutnya membutuhkan kepastian hukum. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu asset hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum. Subjek hokum yang diakui adalah: orang perorangan dan badan hukum. Oleh karena kepemilikan DAPM bukan milik orang perorangan, maka diperlukan badan hukum untuk menegaskan status kepemilikannya, dan menegaskan pengendalian oleh masyarakat (sebagai pemilik dan pemangku utama) atas DAPM.

Badan hukum ini diperlukan untuk:

- a. Memberikan kepastiaan hukum atas kepemilikan DAPM dan asset DAPM oleh masyarakat
- b. Memberikan kejelasan pemisahan antara pengelola DAPM dan pengelola BLM
- c. Melindungi pengelolanya dari segi hukum
- d. Menjamin keberlanjutan pelayanannya dalam memenuhi kebutuhan dana pinjaman bagi warga mikin produktif
- e. Memuka peluang kepada DAPM untuk bekerjasama dengan berbagai program dan berbagi pihak, terutama akses kepada sumber pendaan dan pembiayaan alternatif.

3. Bentuk Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Bentuk dari DAPM ada 3 yaitu:

- a. Unit ekonomi atau keuangan\

Unit ekonomi atau keuangan adalah unit kegiatan yang berpusat pada layanan keuangan, khususnya simpan pinjam dan dikembangkan untuk jasa keuangan lainnya dalam jangka panjang.

- b. Unit sosial

Unit social adalah unit kegiatan yang berpusat pada pelayanan dana social untuk memenuhi kebutuhan sosial lainnya.

- c. Unit usaha lain-lain

Unit usaha lain-lain adalah unit kegiatan yang berpusat pada pengembangan usaha ekonomi lainnya dan layanan usaha diluar jasa keuangan.

4. **Administrasi Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)**

a. **Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK**

Adalah kegiatan untuk mencatat/ merekam semua kejadian/ transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat Kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan laporan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta di dukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan .

Selanjutnya pencatatan semua transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir standar keuangan yang terdiri dari buku kas harian, buku bank, buku inventaris, laporan perkembangan pinjamandan laporan kolektibilitas sesuai dengan formulir PTO.

Jenis- jenis administrasi keuangan dan dana bergulir UPK adalah sebagai berikut:

1) **Buku Kas Harian**

Adalah buku untuk mencatat semua transaksi harian baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang tunai. Sesuai dengan penggolongan jenis dana yang dikelolanya, di UPK terdapat 5 jenis buku kas harian yaitu buku kas harian Dana Operasional Kegiatan (DOK), buku kas harian Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, buku kas harian Operasional UPK, buku kas harian Pengembalian usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan buku kas harian Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

2) Buku Bank

Adalah buku untuk mencatat semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang di Bank. Sesuai dengan penggolongan jenis dana dan rekening yang dikelola, di UPK terdapat 5 jenis buku bank yaitu bank DOK, buku bank Bantuan PNPM mandiri Perdesaan, buku bank Operasional UPK, buku bank Pengemblain UEP dan buku bank Pengembalian SPP.

3) Buku Inventaris

Adalah buku untuk mencatat semua pembelian barang inventaris UPK yang mencakup waktu pembelian, jumlah unit, harga perolehan termasuk nilai penyusutannya.

4) Kartu Kredit/ Pinjaman Kelompok

Adalah kart untuk mencatat setiap penerimaan angsuran dari kelompok oleh UPK. Dalam kartu ini tercantum jadwal pembayaran dan besarnya angsuran. Kartu ini bisa juga berfungsi sebagai bukti pembayaran disamping kuitansi penerimaan uang.

Jenis-jenis pelaporan dana bergulir UPK adalah sebagai berikut:

- a. Laporan perkembangan pinjaman
 - b. Laporan kolektibilitas
 - c. Laporan pinjaman bermasalah
 - d. Laporan perkembangan kelompok
 - e. Laporan jenis kegiatan kelompok
 - f. Laporan pemetaan UPK
 - g. Laporan penilai kesehatan UPK
- b. Administrasi Proses Kegiatan UPK (Non Keuangan)

Adalah kegiatan untuk mencatat atau merekam semua kejadian/ peristiwa yang berkaitan dengan proses PNPM Mnadiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengendalian kegiatan.

Pengadiministrasian ini dilakukan agar semua proses kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dievaluasi.

Secara umum, jenis-jenis dokumen proses kegiatan dikelompokkan menjadi dokumen perencanaan, dokumen persiapan pelaksanaan, dokumen administrasi penyelesaian, dokumen pemantauan dan evaluasi, dokumen pemeliharaan serta pelaporan sesuai Buku Formulir PTO.

c. **Pengelolaan Kearsipan Dokumen UPK**

UPK diwajibkan menyimpan seluruh dokumen baik dokumen keuangan maupun non keuangan. Dalam pengelolaan dokumen, pengelolaan dapat mengacu pada pola yang dianggap baik, sederhana, lengkap, serta mudah dalam pencairannya (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, 2012:4-7).

5. Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah pengelolaan dana bergulir yang berasal dari program (PPK,PNPM-PPK dan PNPM-Mandiri Perdesaan) dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) yang mengacu pada tujuan dan prinsip program. Peran UPK adalah sebagai unit pengelolaan dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Dalam pengelolaan dana bergulir UPK, didukung oleh lembaga pendukung paling tidak oleh Tim Verifikasi dan Badan Pengawas-UPK dengan ketentuan kelembagaan dan operasional diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Bapak Despendri Putra mengatakan untuk tahun 2015 sampai tahun berikutnya UPK ini bukanlan Unit Pengelola Kegiatan PNPM, karena Upk Batu Batikam sudah berdiri sendiri dibawah pengawasan Kecamatan, sedangkan dana untuk mengelola bisnis tersebut diperoleh dari dana bergulir untuk kegiatan SPP.

Jenis dana-dana UPK yang pengelolaannya memerlukan pendampingan fasilitator di kecamatan adalah :

- a. Dana Operasional Kegiatan (DOK) dana yang disediakan oleh program sebagai stimulan pendanaan proses yang terjadi di masyarakat dan dikelola dengan melibatkan masyarakat dengan tujuan pelibatan keswadayaan.
- b. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan oleh program untuk pendanaan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.
- c. Dana Perguliran, yaitu dana yang berasal dari pengembalian pinjaman yang terdiri dari pokok pinjaman dan jasa pinjaman serta denda atas pinjaman yang disalurkan pada masyarakat.

Pemisahan aturan-aturan masing masing penggunaan dana tersebut bertujuan untuk fungsi pembelajaran dalam pemberdayaan dan kemudahan supervisi dan monitoring penggunaan masing-masing dana.

6. Penilaian Kesehatan UPK

a. Pengertian

Penilaian kesehatan UPK adalah proses penilaian yang dilakukan terhadap UPK dalam hal: kelembagaan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan kelembagaan program.

b. Tujuan

Tujuan penilaian kesehatan UPK adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kinerja kuantitatif yaitu kinerja keuangan dan kinerja pengelolaan dana bergulir
- 2) Untuk mengetahui kinerja kelembagaan yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan pinjaman.
- 3) Untuk membuat kategorisasi penilaian UPK yang standar secara nasional dan sesuai dengan kelembagaan program.

- 4) Untuk memberikan informasi yang standar tentang kondisi UPK kepada pihak lain yang akan bekerja sama atau membentuk jaringan dengan UPK

c. Ruang Lingkup Penilaian

Proses penilaian kesehatan dilakukan dengan melakukan pengujian aspek-aspek yang dianggap mendukung dalam pengelolaan program, meliputi:

1) Aspek Kelembagaan

Melakukan penilaian apakah kelembagaan UPK dan pendukung mempunyai system atau aturan yang memadai untuk pengelolaan program dan pelestarian, mempunyai kapasitas SDM yang mendukung, proses yang transparan dan hasil akuntabel. Penilaian kelembagaan ini tidak hanya lembaga UPK saja tetapi termasuk lembaga pendukung yang menjamin operasionalisasi UPK yang meliputi:

- a) MAD/BKAD sebagai pemegang keputusan tertinggi masyarakat dalam menentukan kebijakan UPK
- b) Tim Verifikasi sebagai lembaga pendukung untuk proses perencanaan kegiatan
- c) Badan pengawas UPK sebagai lembaga pengawas secara operasional UPK

Dengan dilakukannya penilaian kelembagaan pendukung tersebut diharapkan agar memberikan standar kelembagaan UPK yang memadai dalam kaitan dengan pengelolaan program dan pelestarian baik yang berasal dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain.

2) Aspek Kuantitatif

Melakukan penilaian dari hasil kinerja yang terdiri dari:

- a) Kinerja keuangan adalah melakukan penilaian sistem atau aturan pengelolaan keuangan yang mencakup proses perencanaan, pelaporan dan hasil pengelolaan. Dalam penilaian aspek ini

menekankan kesiapan UPK dalam mengelola keuangan program apapun atau proyek apapun dikemudian hari, karena penilaian didasarkan pada pengelolaan transaksi keuangan yang normative dengan standar minimal.

- b) Kinerja pengelolaan pinjaman adalah melakukan penilaian system atau aturan perguliran, kondisi permodalan dan hasil pengelolaan peminjaman. Hasil penilaian aspek ini memberikan indikasi tentang kesiapan UPK dalam mengelola kegiatan pinjaman baik secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat diketahui prospek pinjaman yang dikelola pada masa mendatang.

d. Penilaian Indikator

Penilaian indicator adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penilaian masing-masing indicator sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan terdiri dari:

a) Kelembagaan UPK

- (1) Penilaian kapasitas pengurus dengan cara wawancara langsung kepada pengurus tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Lakukan penilaian untuk operasional UPK apakah kelembagaan UPK mempunyai hari kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelayanan, rencana kerja yang mendukung, pengelolaan dokumen dan papan informasi yang mendukung dan transparan
- (3) Lakukan penilaian untuk aturan pengelolaan keuangan
- (4) Lakukan penilaian tentang likuiditas
- (5) Lakukan penilaian tentang aturan perguliran

b) Kelembagaan pendukung UPK

- (1) Kelembagaan MAD/BKAD
- (2) Kelembagaan badan pengawas UPK
- (3) Kelembagaan tim verifikasi

(4) Anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART)

2) Aspek Kuantitatif

Adalah melakukan penilaian kinerja aspek keuangan dan hasil pengelolaan dana bergulir. Sebagai acuan penilaian adalah laporan keuangan microfinance dan laporan pengelolaan dana bergulir yang telah disampaikan dalam bab diatas. Penilaian kinerja dilakukan dengan membuat perhitungan rasio keuangan. Dampak kualitas dana bergulir terhadap keuangan dan sebagainya yang terdiri dari dua aspek:

a) Kinerja Keuangan

(1) Rasio Pendapatan

Rasio pendapatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

(a) Rasio Pendapatan 1

$$RP1 = \frac{P}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RP1 : Rasio Pendapatan (%)

P : Pendapatan Jasa Pinjaman

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara pendapatan ditetapkan sebagai berikut : Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <10%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 10% - 20% dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >20%.

(b) Rasio Pendapatan 2

$$RP2 = \frac{TP}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RP2 : Rasio Pendapatan (%)

TP : Total pendapatan

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman.

Untuk memperoleh rasio antara pendapatan ditetapkan sebagai berikut : Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <20%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 20% - 30%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >30%.

(2) Rasio Biaya

Rasio pendapatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

(a) Rasio Biaya 1

$$RB1 = \frac{BO}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RB1 : Rasio Biaya (%)

BO : Biaya Operasional

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara biaya ditetapkan sebagai berikut : Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >50%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 25%-50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <25%.

(b) Rasio Biaya 2

$$RB2 = \frac{TB}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RB1 : Rasio Biaya (%)

TB : Total Biaya

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara biaya ditetapkan sebagai berikut : Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >50%. Disebut “cukup”

apabila bernilai 2 berada pada skala 30%-50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <30%.

(c) Rasio Biaya 3

$$RB3 = \frac{TBO}{P} \times 100 \%$$

Keterangan: RB1 : Rasio Biaya (%)

TBO : Total Biaya Operasional

P : Pendapatan Jasa Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara biaya ditetapkan sebagai berikut : Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >75%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 50%-75%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <50%.

(d) Rasio Biaya 4

$$RB4 = \frac{TB}{TP} \times 100 \%$$

Keterangan: RB1 : Rasio Biaya (%)

TB : Total Biaya

TP : Total Pendapatan

Untuk memperoleh rasio antara biaya ditetapkan sebagai berikut : Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >80%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 60%-80%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <60%.

(3) Rasio Laba/Surplus

Rasio laba/surplus ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

(a) Rasio Laba 1

$$RL1 = \frac{LO}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RL1 : Rasio Laba (%)

LO : Laba/ Surplus Operasional

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara laba ditetapkan sebagai berikut : Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <10%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 10%-20%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >20%.

(b) Rasio Laba 2

$$RL2 = \frac{LA}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RL2 : Rasio Laba (%)

LA : Laba/Surplus Akhir

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara laba ditetapkan sebagai berikut : Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <5%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >10%.

(c) Rasio Laba 3

$$RL3 = \frac{LA}{TP} \times 100 \%$$

Keterangan: RL3 : Rasio Laba (%)

LA : Laba/ Surplus Akhir

TP : Total Pendapatan

Untuk memperoleh rasio antara laba ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <10%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 10%-15%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >15%.

(4) Efektivitas Pengelolaan Dana

Rasio efektivitas pengelolaan dana ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

(a) Rasio Efektivitas 1

$$RE1 = \frac{RSK}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RE1 : Rasio Efektivitas (%)

RSKDP : Rata-rata Saldo Kas

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara efektivitas pengelolaan dana ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >5%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 3%-5%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <3%.

(b) Rasio Efektifitas 2

$$RE2 = \frac{RSB}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RE2 : Rasio Efektivitas (%)

RSB : Rasio Saldo Bank

RTSP : Rata-rata sALDo Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara efektivitas pengelolaan dana ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >20%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 10%-20%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <10%.

(c) Rasio Efektifitas 3

$$RE3 = \frac{NPI}{LO} \times 100 \%$$

Keterangan: RE2 : Rasio Efektivitas (%)

NPI : Nilai Pembelian Inventaris

Lo : Laba Operasional

Untuk memperoleh rasio antara efektivitas pengelolaan dana ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini

dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >10%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <5%.

(5) Resiko Pinjaman

Rasio risiko pinjaman ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

(a) Rasio resiko pinjaman 1

$$RRP1 = \frac{TP}{RSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RRP1 : Rasio Risiko Pinjaman (%)

RSP : Risiko Pinjaman

TP : Total Pendapatan

Untuk memperoleh rasio alokasi keuntungan ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >50%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 25%-50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <25%.

(b) Rasio Risiko Pinjaman 2

$$RRP2 = \frac{TRBP}{RSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RRP2 : Rasio risiko pinjaman (%)

TRBP : Total Realisasi Biaya Penghapusan

RSP : Risiko Pinjaman

Untuk memperoleh rasio resiko pinjaman ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >50%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 25%-50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <25%.

(c) Rasio Resiko Pinjaman 3

$$RRP3 = \frac{TRBP}{TP} \times 100 \%$$

Keterangan: RRP3 : Rasio Risiko Biaya(%)

TRBP : Total Realisasi Biaya Penghapusan

TP : Total Pendapatan

Untuk memperoleh rasio resiko pinjaman ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >10%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <5%.

(6) Alokasi laba

$$RAK = \frac{TL}{LDT} \times 100 \%$$

Keterangan: RAK : Rasio Alokasi Keuntungan(%)

LDT : Laba Ditahan

TL : Total Laba

Untuk memperoleh rasio alokasi keuntungan ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <25%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 25%-50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >50%.

b) Kinerja Pengelolaan Pinjaman

(1) Rasio Pertumbuhan Permodalan

$$RRP = \frac{SP + DB}{(SP + DB)^{-1}} \times 100 \%$$

Keterangan: SP : Saldo Pinjaman

DB : Dana Bergulir

$(SP + DB)^{-1}$: Saldo Pinjaman Dana Bergulir Tahun Lalu

Untuk memperoleh rasio alokasi keuntungan ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai

1 berada pada skala <5%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >10%.

(2) Rasio Pertumbuhan Kelompok

$$RPK = \frac{JKP}{(JKP)^{-1}} \times 100 \%$$

Keterangan: JKP : Jumlah Kelompok Peminjam

(JKP)⁻¹ : Jumlah Kelompok Peminjam Tahun

Lalu

Untuk memperoleh rasio alokasi keuntungan ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <5%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5%-10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >10%.

(3) Rasio Tingkat Pengembalian

$$RTP = \frac{TPM}{PPM} \times 100 \%$$

Keterangan: TPM : Total Pinjaman

PPM : Pengembalian Pinjaman

Untuk memperoleh rasio alokasi keuntungan ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <60%. Disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 60%-80%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >80%.

(4) Resiko Pinjaman

$$RP = \frac{T}{S} \times 100 \%$$

Keterangan: T : Total Tunggakan Diatas 6 Bulan

S : Total Saldo Pinjaman Pembiayaan

Untuk memperoleh rasio alokasi keuntungan ditetapkan sebagai berikut: Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >40%. Disebut “cukup” apabila bernilai

2 berada pada skala 20%-40%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala 20%.

e. Nilai Kesehatan

Proses penilaian sampai dengan mendapatkan nilai kesehatan dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian indikator kemudian menjumlahkan masing-masing aspek penilaian. Hasil penjumlahan tiap aspek dimasukkan dalam tabel total nilai pada masing aspek.
- b) Perhitungan nilai konversi dilakukan dengan membagi total nilai dengan nilai maksimal dan hasilnya dikalikan dengan angka 100.
- c) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan mengalikan nilai konversi dengan bobot penilaian masing-masing aspek
- d) Perhitungan nilai kesehatan dengan menjumlahkan nilai akhir masing-masing aspek penilaian dan dibagi 2 (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, 2012:41-46).

f. Penetapan Kesehatan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 2 aspek tersebut, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan prediksi tingkat kesehatan UPK yang dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan UPK tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Prediksi Tingkat Kesehatan UPK

Kategori	Nilai Aspek Kuantitatif
Sehat	Lebih dari 75
Cukup Sehat	Antara 60 s/d 75
Tidak Sehat	Kurang dari 60

Sumber: PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:53)

D. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. Pengertian SPP

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008:11).

2. Tujuan SPP

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- 3) Mendorong pengaturan kelembagaan kaum perempuan simpan pinjam oleh kaum perempuan
- 4) Sasaran program

Sasaran program adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008:58).

3. **Ketentuan Kelompok SPP**

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan pada anggota.
- d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- e. Mempunyai organisasi pada kelompok dan administrasi secara sederhana.

Program SPP yang dibawa oleh PNPM, menjadi salah satu bagian pembiayaan langsung oleh pemerintah guna membantu permodalan bagi kelompok perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Persoalannya terletak pada pengembalian pinjaman kelompok SPP tersebut kepada UPK sebagai pengelola kegiatan yang diikuti dengan pengembalian jasa 0,9% perbulan.

4. **Kelompok Simpan Pinjam Perempuan**

- a. Penguatan organisasi dengan fasilitas pembuatan AD/ART, fasilitas pembuatan SOP, dan sebagainya.
- b. Penguatan pengelolaan keuangan dengan fasilitas penguatan administrasi dan pelaporan keuangan, fasilitasi peningkatan permodalan dengan pengembangan jaringan, fasilitasi peningkatan simpanan anggota, dan sebagainya.
- c. Penguatan pengelolaan pinjaman dengan fasilitasi pembuatan aturan mekanisme penyaluran pinjaman, fasilitasi pengelolaan pinjaman bermasalah, dan sebagainya (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008:58).

E. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil peninjauan penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan aspek yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrudi (2015) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Finansial Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Rambah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan mengukur kinerja finansial Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Rambah selama periode 2013 dan 2014 ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas.

Hasil perhitungan rasio keuangan pilihan akan menggambarkan kinerja finansial BUMDes di Kecamatan Rambah apakah sehat atau kurang sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas (rasio lancar) keempat BUMDes di Kecamatan Rambah dalam kondisi sangat baik sedangkan rasio kas keempat BUMDes dalam kondisi sangat baik dan tidak baik. Rasio solvabilitas (*debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*) keempat BUMDes dalam kondisi sangat baik. Rasio profitabilitas (rasio *net profit margin*) untuk keempat BUMDes dalam kondisi sangat baik, sedangkan rasio ROA untuk keempat BUMDes dalam kondisi baik, cukup baik, dan kurang baik. Rasio aktivitas (rasio *receivable turn over* dan rasio *total asset turn over*) untuk keempat BUMDes dalam kondisi tidak baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Irastina (2013) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Purbalingga periode tahun 2009-2012”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Purbalingga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan UPK PNPM MPd di kabupaten Purbalingga dilihat dari aspek pengelolaan keuangannya dari tahun 2009 hingga 2012 berkisar antara interval 85,42%-87,50% termasuk kategori kinerja yang baik, sedangkan kinerja keuangan UPK PNPM MPd di kabupaten Purbalingga dilihat dari aspek pengelolaan pinjaman dari tahun 2009 hingga 2012 berkisar antara interval 83,33%-91,67% termasuk kategori kinerja yang baik. Hasil penilaian kesehatan UPK PNPM MPd di kabupaten Purbalingga dari tahun 2009 hingga 2012 besarnya lebih dari 75, termasuk kategori sehat.

3. Penelitian oleh Aini Fitri yang berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015 berdasarkan rasio pendapatan, rasio laba, rasio biaya, efektivitas pengelolaan dana, resiko pinjaman dan alokasi keuntungan.

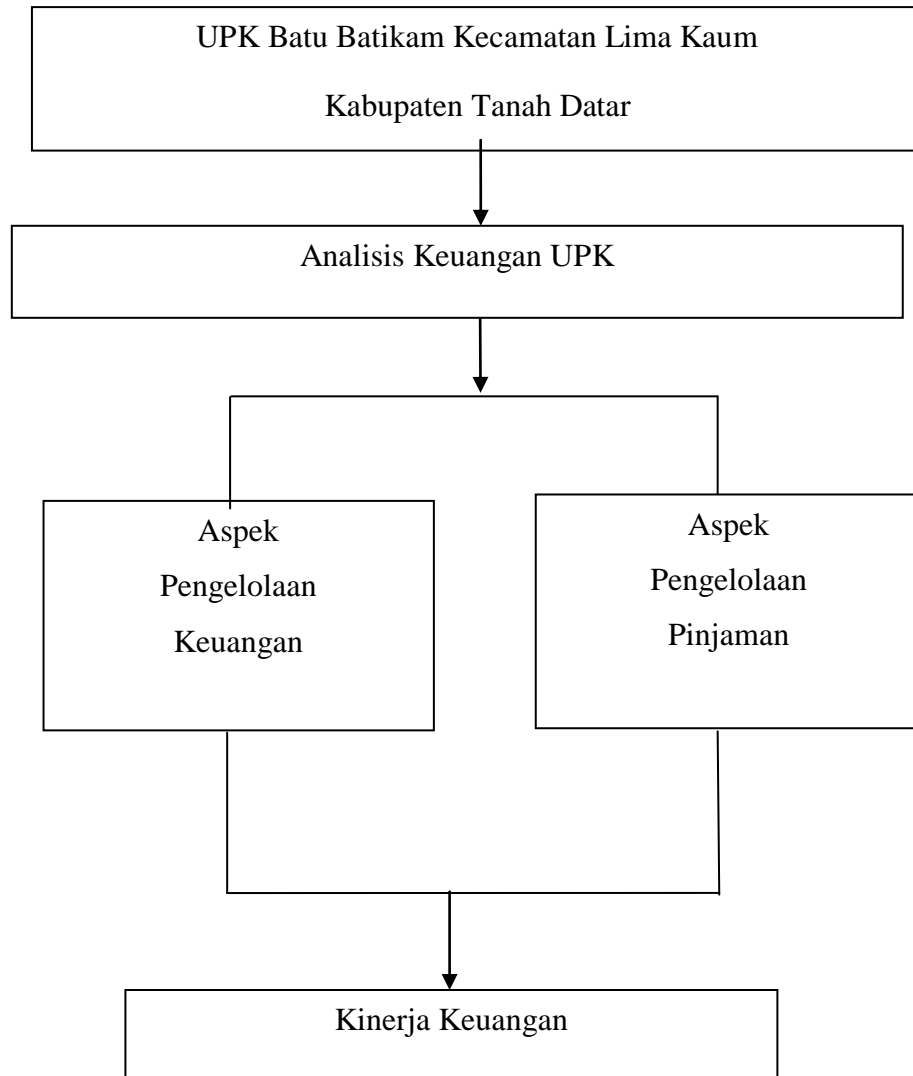
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan UPK PNPM MPd di Kecamatan Negara dalam kondisi sehat, hal ini ditunjukkan dengan hasil tahun 2013 sebesar 93,75 %, tahun 2014 sebesar 93,75 % dan tahun 2015 sebesar 93,75 %. Maka dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan UPK PNPM MPd di Kecamatan Negara sudah berjalan dengan efektif.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Nuryaman, 2015:60). Proposal ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Periode laporan keuangan digunakan dalam

proposal ini adalah tahun 2015-2017 pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2012: 5). Pada penelitian ini penulis menggunakan rasio keuangan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar .

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian penulis lakukan mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan lokasi di UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan serta data umum mengenai perusahaan. Data ini diperoleh dari UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan bukti tertulis dari pihak yang bersangkutan. Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data sekunder dari kepengurusan UPK Batu Batikam

Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar , yang digunakan laporan posisi keuangan yang menyangkut dengan kinerja keuangan perusahaan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya peneliti untuk memahami apa yang terdapat dibalik data dan menjadikannya suatu informasi yang utuh dan mudah dimengerti serta menemukan suatu pola umum yang timbul dari data tersebut. Data yang diperoleh dari dokumen akan diolah secara kuantitatif.

Dalam mengukur kinerja keuangan pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Aspek-aspek yang digunakan adalah aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan pinjaman sebagai berikut:

1. Aspek Pengelolaan Keuangan

a. Rasio Pendapatan

Rasio pendapatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

1) Rasio Pendapatan 1

$$RP1 = \frac{P}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RP1 : Rasio Pendapatan (%)

P : Pendapatan Jasa Pinjaman

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

2) Rasio Pendapatan 2

$$RP2 = \frac{TP}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RP2 : Rasio Pendapatan (%)

TP : Total pendapatan

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman.

Standarnya yaitu: - Lebih dari 30% nilainya 3 = Baik
 - 20% s/d 30% nilainya 2 = Cukup
 - Kurang dari 20% nilainya 1 = Kuran

b. Rasio Biaya

Rasio pendapatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

1) Rasio Biaya 1

$$RB1 = \frac{BO}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RB1 : Rasio Biaya (%)

BO : Biaya Operasional

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

2) Rasio Biaya 2

$$RB2 = \frac{TB}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RB2 : Rasio Biaya (%)

TB : Total Biaya

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

3) Rasio Biaya 3

$$RB3 = \frac{TBO}{P} \times 100 \%$$

Keterangan: RB3 : Rasio Biaya (%)

TBO : Total Biaya Operasional

P : Pendapatan Jasa Pinjaman

4) Rasio Biaya 4

$$RB4 = \frac{TB}{TP} \times 100 \%$$

Keterangan: RB4 : Rasio Biaya (%)

TB : Total Biaya

TP : Total Pendapatan

Standarnya yaitu: - Kurang dari 30% nilainya 3 = Baik
 - 30% s/d 50% nilainya 2 = Cukup
 - Lebih dari 50% nilainya 1 = Kurang

c. Rasio Laba

Rasio laba/surplus ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

1) Rasio Laba 1

$$RL1 = \frac{LO}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RL1 : Rasio Laba (%)

LO : Laba Operasional

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

2) Rasio Laba 2

$$RL2 = \frac{LA}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RL2 : Rasio Laba (%)

LA : Laba/ Surplus Akhir

RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

3) Rasio Laba 3

$$RL3 = \frac{LA}{TP} \times 100 \%$$

Keterangan: RL3 : Rasio Laba (%)

LA : Laba/ Surplus Akhir

TP : Total Pendapatan

Standarnya yaitu: - Lebih dari 15% nilainya 3 = Baik
 - 10% s/d 15 % nilainya 2 = Cukup
 - Kurang dari 10% nilainya 1 = Kurang

d. Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana

Rasio efektivitas pengelolaan dana ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

1) Rasio Efektivitas 1

$$RE = \frac{RSK}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RE1 : Rasio Efektivitas (%)
 RSK : Rata-rata Saldo Kas
 RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

2) Rasio Efektifitas 2

$$RE2 = \frac{RSB}{RTSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RE2 : Rasio Efektivitas (%)
 RSB : Rasio Saldo Bank
 RTSP : Rata-rata Saldo Pinjaman

3) Rasio Efektifitas 3

$$RE3 = \frac{NPI}{LO} \times 100$$

Keterangan: RE3 : Rasio Efektivitas (%)
 NPI : Nilai Pembelian Inventaris
 LO : Laba Operasional

Standarnya yaitu: - Kurang dari 5% nilainya 3 = Baik
 - 5% s/d 10% nilainya 2 = Cukup
 - Lebih dari 10% nilainya 1 = Kurang

e. Rasio Alokasi Keuntungan

$$RAK = \frac{TL}{LDT} \times 100 \%$$

Keterangan: RAK : Rasio alokasi Keuntungan(%)
 LDT : Laba ditahan
 TL : Total laba

Standarnya yaitu :- Lebih dari 50% nilainya 3= Baik
 - 25% s/d 50% nilainya 2 = Cukup
 - Kurang dari 25% nilainya 1 = Kurang

f. Rasio Risiko Pinjaman

Rasio risiko pinjaman ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

1) Rasio Resiko Pinjaman 1

$$RRP1 = \frac{TP}{RSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RRP1 : Rasio Risiko Pinjaman (%)

RSP : Risiko Pinjaman

TP : Total Pendapatan

2) Rasio Risiko Pinjaman 2

$$RRP2 = \frac{TRBP}{RSP} \times 100 \%$$

Keterangan: RRP2 : Rasio risiko pinjaman (%)

TRBP : Total Realisasi Biaya Penghapusan

RSP : Risiko Pinjaman

3) Rasio Resiko Pinjaman 3

$$RRP3 = \frac{TRBP}{TP} \times 100 \%$$

Keterangan: RRP3 : Rasio risiko Biaya(%)

TRBP : Total Realisasi Biaya Penghapusan

TP : Total Pendapatan

Standarnya yaitu: - Kurang dari 25% nilainya 3 = Baik
 - 25% s/d 50% nilainya 2 = Cukup
 - Lebih dari 50% nilainya 1 = Kurang

2. Aspek Pengelolaan Pinjaman

a. Rasio Pertumbuhan Permodalan

$$RRP = \frac{SP + DB}{(SP + DB)^{-1}} \times 100 \%$$

Keterangan: SP : Saldo Pinjaman

DB : Dana Bergulir

$(SP + DB)^{-1}$: Saldo pinjaman dana bergulir tahun lalu

Standarnya yaitu: - Kurang dari 5% nilainya 1 = Kurang
 - 5% s/d 10% nilainya 2 = Cukup
 - Lebih dari 10% nilainya 3 = Baik

b. Rasio Pertumbuhan Kelompok

$$RPK = \frac{JKP}{(JKP)^{-1}} \times 100 \%$$

Keterangan: JKP : Jumlah kelompok peminjam

$(JKP)^{-1}$: Jumlah kelompok peminjam tahun lalu

Standarnya yaitu: - Kurang dari 5% nilainya 1 = Kurang
 - 5% s/d 10% nilainya 2 = Cukup
 - Lebih dari 10% nilainya 3 = Baik

c. Rasio Tingkat Pengembalian

$$RTP = \frac{TPM}{PPM} \times 100 \%$$

Keterangan: TPM : Total pinjaman

PPM : Pengembalian Pinjaman

Standarnya yaitu: - Di bawah 60% nilainya 1 = Kurang
 - 60% s/d 80% nilainya 2 = Cukup
 - Lebih dari 80% nilainya 3 = Baik

d. Resiko Pinjaman / Kolektibilitas Pinjaman

$$RP = \frac{T}{S} \times 100 \%$$

Keterangan: T : Total tunggakan diatas 6 bulan

S : Total saldo pinjaman pembiayaan

Standarnya yaitu: - Lebih dari 40% nilainya 1 = Kurang
 - 20% s/d 40% nilainya 2 = Cukup
 - Sampai dengan 20% nilainya 3 = Baik

Setelah dilakukan analisis penilaian kinerja keuangan, selanjutnya dapat diketahui nilai kesehatan UPK dilihat dari aspek kuantitatifnya. Adapun langkah-langkahnya yang telah dijelaskan dalam PTO adalah berikut ini (lihat Tabel I).

Tabel 3.1
Lembar Nilai Kesehatan UPK

Aspek Penilaian	Total Nilai (a)	Nilai Maksimal (b)	Nilai Konversi $c = (a/b) \times 100$	Bobot Penilaian (d)	Nilai Akhir $e = c \times d$
Penilaian Pengelolaan Keuangan				50 %	
Penilaian Pengelolaan Pinjaman				50 %	
Nilai Kesehatan					

Sumber: PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:52)

Keterangan tabel Sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian indicator kemudian menjumlahkan untuk masing-masing aspek penilaian. Hasil penjumlahan setiap aspek dimasukan dalam tabel total nilai pada aspek penilaian.
- b. Perhitungan nilai konversi dilakukan dengan membagi total nilai dengan nilai maksimal dan hasilnya dikalikan dengan angka 100.
- c. Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan pengalian nilai konversi dengan bobot penilaian masing-masing aspek penilaian.

Kategori kesehatan UPK dapat dilihat pada tabel 3.2 yang mana berisi skala interval nilai yaitu, kategori “Sehat” berada pada nilai lebih dari 75, kategori “Cukup Sehat” berada pada nilai lebih dari 60 samapai dengan 75, kategori “Tidak Sehat” berada pada nilai kurang dari 60.

Tabel 3.2
Lembar Kategori Kesehatan UPK

Kategori	Nilai Aspek Kuantitatif
Sehat	Lebih dari 75
Cukup Sehat	Antara 60 s/d 75
Tidak Sehat	Kurang dari 60

(Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd), 2012:42-44).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah UPK Kecamatan Lima Kaum

1. Sejarah UPK Lima Kaum

Kecamatan ini telah berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) yang sekarang disebut dengan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) sejak tahun 2007. Sampai tahun 2015, Kecamatan Lima Kaum telah mendapatkan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 8.845.302.100. Dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK Lima Kaum. Berikut akumulatif dana BLM yang dikelola UPK.

Tabel 4.1
BLM yang Dikelola UPK “Batu Batikam”

Tahun	Jumlah
2007	Rp. 1.000.000.000
2008	Rp. 2.000.000.000
2009	Rp. 900.000.000
2010	Rp. 1.500.000.000
2011	Rp. 450.000.000
2011 Integrasi	Rp. 442.110.300
2012	Rp. 800.000.000
2012 Integrasi	Rp. 555.823.600
2013	Rp. 850.000.000
2013 Integrasi	Rp. 347.368.200
Total	Rp. 8.845.302.100

Secara umum, dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan dibidang peningkatan kapasitas, pembangunan dan rehabilitasi sarana/ prasarana perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan serta kegiatan ekonomi melalui perguliran dana, baik melalui skema Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).

Secara akumulatif dari awal mendapatkan BLM hingga saat ini, sebagian besar dana BLM di Kecamatan Lima Kaum ini, yaitu sekitar 100% dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan dibidang sarana dan prasarana yaitunya Pembuatan Irigasi 8 paket, Air Bersih 2 paket, Pembuatan Gedung TK 6 paket, Pembuatan Posyandu 1 paket, Pembukaan Jalan Baru 1 paket dan Rabat Beton 3 paket ditambah Jembatan 1 paket, Bidang Keterampilan 3 paket dan bidang Simpan Pinjam Perempuan sebanyak 56 kelompok SPP.

Tahun 2014 PNPM Mandiri Perdesaan berakhir maka berakhir juga dana BLM yang disalurkan oleh Pemerintah untuk semua kegiatan . Mulai tahun 2015 UPK Batu Batikam merupakan Unit Pengelolaan Kegiatan yang mengelola dana bergulir saja, dan dana tersebutlah yang disalurkan untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai saat ini.

2. Visi dan Misi UPK Lima Kaum

Visi dari UPK Batu Batikam adalah **“Menjadikan UPK Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Yang Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Dalam Kecamatan Lima Kaum”**.

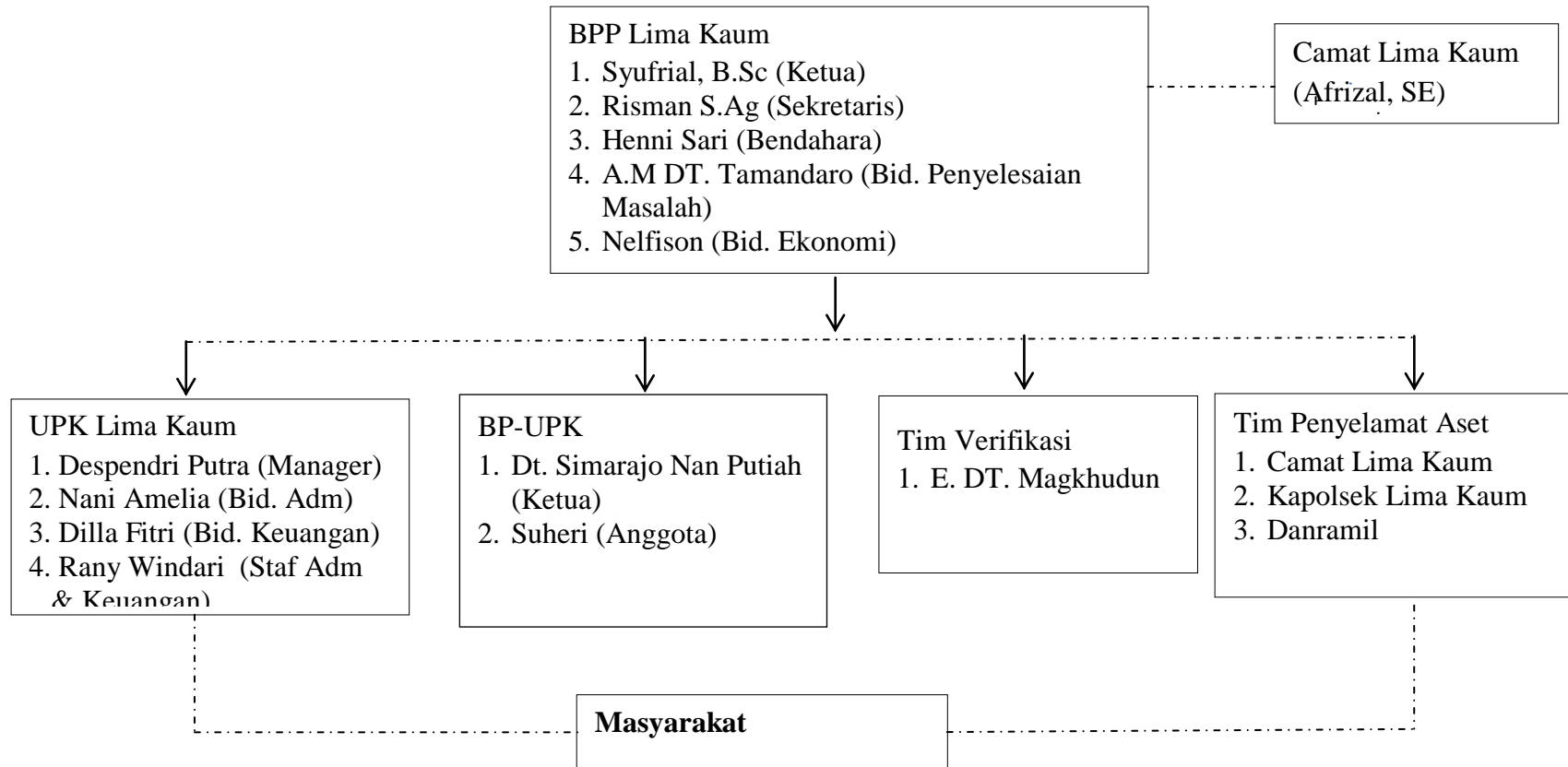
Misi UPK Batu Batikam adalah:

- a. Menjalani kerjasama dengan lembaga keuangan dan dinas terkait lainnya.
- b. Meningkatkan kualitas kelompok Simpan Pinjam dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan.
- c. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok Simpan Pinjam di wilayah Kecamatan Lima Kaum
- d. Pembinaan daya tahan ekonomi kelompok keluarga miskin terhadap kondisi ekonomi.

3. Struktur Organisasi UPK Lima Kaum

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini yang dibahas ada 2 aspek yaitu :

1. Aspek Pengelolaan Keuangan

Pada aspek pengelolaan keuangan ini terdapat enam rasio keuangan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Pendapatan

1) Rasio Pendapatan 1

$$\begin{aligned} \text{RP1} &= \frac{\text{Pendapatan Jasa Pinjaman}}{\text{Rata-rata Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{549.081.000}{3.102.357.900} \times 100 \% \\ &= 17,69 \% \end{aligned}$$

2) Rasio Pendapatan 2

$$\begin{aligned} \text{RP2} &= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Rata-rata Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{550.485.660}{3.102.357.900} \times 100 \% \\ &= 17,74 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.2

Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RP1	Pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman.	Lebih dari 20 %	10 % s/d 20 %	Kurang dari 10 %
RP2	Total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman	Lebih dari 30 %	20 % s/d 30 %	Kurang dari 20 %

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:50)

Rasio pendapatan 1 diperoleh dari pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 17,69 % dengan nilai 2 yang termasuk kategori “cukup”, sedangkan rasio pendapatan 2 diperoleh dari total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 17,74 % dengan nilai 1 yang termasuk kategori “kurang”.

b. Rasio Biaya

1) Rasio Biaya 1

$$\begin{aligned} \text{RB1} &= \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Rata-rata Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{267.887.100}{3.102.357.900} \times 100 \% \\ &= 8,63 \% \end{aligned}$$

2) Rasio Biaya 2

$$\begin{aligned} \text{RB2} &= \frac{\text{Total Biaya}}{\text{Rata-rata Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{268.200.128}{3.102.357.900} \times 100 \% \\ &= 8,64\% \end{aligned}$$

3) Rasio Biaya 3

$$\begin{aligned} \text{RB3} &= \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Jasa Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{267.887.100}{549.081.000} \times 100 \% \\ &= 48,78\% \end{aligned}$$

4) Rasio Biaya 4

$$\begin{aligned} \text{RB4} &= \frac{\text{Total Biaya}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \% \\ &= \frac{268.200.128}{550.485.660} \times 100 \% \\ &= 48,72 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.3
Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RB 1	Biaya operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman	Kurang dari 25%	25% s/d 50%	Lebih dari 50%
RB 2	Total biaya terhadap rata-rata saldo pinjaman	Kurang dari 30%	30% s/d 50%	Lebih dari 50%
RB 3	Total biaya operasional terhadap pendapatan jasa pinjaman	Kurang dari 50%	50% s/d 75%	Lebih dari 75%
RB 4	Total biaya terhadap total pendapatan	Kurang dari 60%	60% s/d 80%	Lebih dari 80%

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:50)

Rasio biaya 1 diperoleh dari biaya operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 8,63 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”, untuk rasio biaya 2 diperoleh dari total biaya terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 8,64 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”, untuk rasio biaya 3 diperoleh dari total biaya operasional terhadap pendapatan jasa pinjaman sebesar 48,78 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”, sedangkan untuk rasio biaya 4 diperoleh dari total biaya terhadap total pendapatan sebesar 48,72 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”.

c. Rasio Laba/Surplus

a. Rasio Laba 1

$$\begin{aligned} \text{RL1} &= \frac{\text{Laba/ Surplus Operasional}}{\text{Rata-rata Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{281.193.900}{3.102.357.900} \times 100 \% \\ &= 9,06 \% \end{aligned}$$

b. Rasio Laba 2

$$\begin{aligned} \text{RL2} &= \frac{\text{Laba/ Surplus Akhir}}{\text{Rata-Rata Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{282.285.532}{3.102.357.900} \times 100 \% \\ &= 9,09 \% \end{aligned}$$

c. Rasio Laba 3

$$\begin{aligned} \text{RL3} &= \frac{\text{Laba/ Surplus Akhir}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \% \\ &= \frac{282.285.532}{550.485.660} \times 100 \% \\ &= 51,27 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.4
Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RL 1	Laba/surplus operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman	Lebih dari 20%	10% s/d 20%	Kurang dari 10%
RL 2	Laba/surplus akhir terhadap rata-rata saldo pinjaman	Lebih dari 10%	5% s/d 10%	Kurang dari 10%
RL 3	Laba/surplus akhir terhadap total pendapatan	Lebih dari 15%	10% s/d 15%	Kurang dari 10%

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:50)

Rasio laba 1 diperoleh dari laba/surplus operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 9,06 % dengan nilai 1 yang termasuk kategori “kurang”, untuk rasio laba 2 diperoleh dari laba/surplus akhir terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 9,09 % dengan nilai 2 yang termasuk kategori “cukup”, sedangkan rasio laba 3 diperoleh dari laba/surplus akhir terhadap total pendapatan sebesar 51,27 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”,

d. Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana

a. Rasio Efektivitas 1

$$\begin{aligned} RE1 &= \frac{\text{Rata-rata Saldo Kas}}{\text{Rata-rata Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.915.925}{3.102.357.900} \times 100 \% \\ &= 0,06 \% \end{aligned}$$

b. Rasio Efektivitas 2

$$\begin{aligned} RE2 &= \frac{\text{Rata-rata Saldo Bank}}{\text{Rata-rata Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{25.789.261}{3.102.357.900} \times 100 \% \\ &= 0,83 \% \end{aligned}$$

c. Rasio Efektivitas 3

$$\begin{aligned} RE3 &= \frac{\text{Nilai Pembelian Inventaris}}{\text{Laba Operasional}} \times 100 \% \\ &= \frac{38.816.667}{281.193.900} \times 100 \% \\ &= 13,80 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.5

Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RE 1	Rata-rata saldo kas terhadap rata-rata saldo pinjaman	Kurang dari 3%	3% s/d 5%	Lebih dari 5%
RE 2	Rata-rata saldo bank	Kurang	10% s/d	Lebih

	terhadap rata-rata saldo pinjaman	dari 10%	20%	dari 20%
RE 3	Nilai pembelian inventaris terhadap laba operasional	Kurang dari 5%	5% s/d 10%	Lebih dari 10%

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:50)

Rasio efektivitas 1 diperoleh dari rata-rata saldo kas terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 0,06 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”, untuk rasio efektivitas 2 diperoleh dari rata-rata saldo bank terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 0,83 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”, sedangkan rasio efektivitas 3 diperoleh dari rasio nilai pembelian inventaris terhadap laba operasional sebesar 13,80 % dengan nilai 1 yang termasuk kategori “kurang”,

e. Rasio Risiko Pinjaman

1) Rasio Risiko Pinjaman 1

$$\begin{aligned} RRP1 &= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Resiko Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{550.485.660}{3.071.105.000} \times 100 \% \\ &= 17,92 \% \end{aligned}$$

2) Rasio Risiko Pinjaman 2

$$\begin{aligned} RRP2 &= \frac{\text{Realisasi Biaya Penghapusan}}{\text{Resiko Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{100.149.050}{3.071.105.000} \times 100 \% \\ &= 3,26 \% \end{aligned}$$

3) Rasio Risiko Pinjaman 3

$$\begin{aligned} RRP2 &= \frac{\text{Realisasi Biaya Penghapusan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \% \\ &= \frac{100.149.050}{550.485.660} \times 100 \% \\ &= 18,19 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.6
Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RRP 1	Total pendapatan dibandingkan dengan rasio risiko pinjaman	Kurang dari 25%	25% s/d 50%	Lebih dari 50%
RRP 2	Rasio realisasi biaya penghapusan terhadap resiko pinjaman	Kurang dari 25%	25% s/d 50%	Lebih dari 50%
RRP 3	Rasio realisasi biaya penghapusan terhadap total pendapatan	Kurang dari 5%	5% s/d 10%	Lebih dari 10%

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:50)

Rasio resiko pinjaman 1 diperoleh total pendapatan dibandingkan dengan rasio risiko pinjaman sebesar 17,92 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”, untuk rasio efektivitas 2 diperoleh dari rasio realisasi biaya penghapusan terhadap resiko pinjaman sebesar 3,26 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”, sedangkan rasio efektivitas 3 diperoleh dari rasio rasio realisasi biaya penghapusan terhadap pendapatan sebesar 18,19 % dengan nilai 1 yang termasuk kategori “kurang”,

f. Alokasi Keuntungan

$$\begin{aligned} \text{RAK} &= \frac{\text{Keuntungan/ Laba}}{\text{Alokasi Tambahan Modal/Laba Ditahan}} \times 100 \% \\ &= \frac{282.285.532}{936.549.480} \times 100 \% \\ &= 30,14 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.7

Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RAK 1	Total laba/surplus terhadap laba/surplus yang ditahan	Lebih dari 50%	25% s/d 50%	Kurang dari 25%

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:50)

Rasio alokasi keuntungan diperoleh total laba/surplus terhadap laba/surplus yang ditahan sebesar 30,14 % dengan nilai yang termasuk kategori “cukup”.

2. Aspek Pengelolaan Pinjaman

Pada aspek pengelolaan keuangan ini terdapat enam rasio keuangan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Pertumbuhan Permodalan

$$\begin{aligned} \text{RPP} &= \frac{\text{Saldo Pinjaman} + \text{Dana Bergulir}}{(\text{Saldo Pinjaman} + \text{Dana Bergulir})^{-1}} \times 100 \% \\ &= \frac{3.171.338.000 + 6.266.625.000}{3.033.377.800 + 6.054.500.000} \times 100 \% \\ &= 1,03 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.8

Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RPP	Perhitungan seluruh saldo pinjaman ditambah dana perguliran (kas dan	Lebih dari 10%	5% s/d 10%	Kurang dari 5%

	bank) saat penilaian dibagi dengan pinjaman dan dana perguliran tahun lalu			
--	----------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:51)

Rasio pengelolaan pinjaman diperoleh dari seluruh saldo pinjaman ditambah dana perguliran (kas dan bank) saat penilaian dibagi dengan pinjaman dan dana perguliran tahun lalu sebesar 1,03 % dengan nilai 1 yang termasuk kategori “kurang”.

b. Rasio Pertumbuhan Kelompok

$$\begin{aligned}
 \text{RPK} &= \frac{\text{Jumlah Kelompok Peminjam}}{(\text{Jumlah Kelompok Peminjam})^1} \times 100 \% \\
 &= \frac{84}{65} \times 100 \% \\
 &= 1,29 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.9

Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RPK	Jumlah kelompok peminjam/ pemanfaat saat penilaian dibagi jumlah peminjam kelompok tahun lau	Lebih dari 10%	5% s/d 10%	Kurang dari 5%

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:51)

Rasio pertumbuhan jumlah kelompok diperoleh dari jumlah kelompok peminjam/ pemanfaat saat penilaian dibagi jumlah peminjam kelompok tahun lau sebesar 1,29 % dengan nilai 1 yang termasuk kategori “kurang”.

c. Rasio Tingkat Pengembalian

$$\begin{aligned} \text{RTP} &= \frac{\text{Total Pinjaman}}{\text{Pengembalian Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{3.169.338.000}{6.135.163.000} \times 100 \% \\ &= 51,65 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.10

Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RTP	Total pinjaman dibagi dengan pengembalian pinjaman	Lebih dari 80%	60% s/d 80%	Kurang dari 60%

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:51)

Rasio tingkat pengembalian diperoleh dari total pinjaman dibagi dengan pengembalian pinjaman sebesar 51,65 % dengan nilai 1 yang termasuk kategori “kurang”.

d. Resiko Pinjaman/ Kolektibilitas Pinjaman

$$\begin{aligned} \text{RP} &= \frac{\text{Total Tunggakan Di Atas 6 Bulan}}{\text{Total Saldo Pinjaman}} \times 100 \% \\ &= \frac{69.438.000}{3.169.338.000} \times 100 \% \\ &= 2,19 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.11

Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman

Ket	Aspek Penilaian	Baik	Cukup	Kurang
		Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1
RP	Total tunggakan di atas 6 bulan dibagi total saldo pembiayaan	Sampai dengan 20%	20% s/d 40%	Lebih dari 40%

Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM MPd (2012:51)

Rasio tingkat pengembalian diperoleh dari total tunggakan di atas 6 bulan dibagi total saldo pembiayaan sebesar 2,19 % dengan nilai 3 yang termasuk kategori “baik”.

Berdasarkan analisis di atas untuk mengukur kinerja keuangan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, maka perlulah di buat lembar penilaian terhadap beberapa aspek yang digunakan yaitu aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan pinjaman yang merujuk kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

3. Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan

Lembar penilaian aspek pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Keuangan

Aspek Penilaian			Rasio	Baik	Cukup	Kurang	Nilai
				Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1	
Rasio Pendapatan	1	Pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman	17,69%	Lebih dari 20%	10% s/d 20%	Kurang dari 10%	2
	2	Total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman	17,74%	Lebih dari 30%	20% s/d 30%	Kurang dari 20%	1
Rasio Biaya	3	Biaya operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman	8,63%	Kurang dari 25%	25% s/d 50%	Lebih dari 50%	3
	4	Total biaya rata-rata saldo pinjaman	8,64%	Lebih dari 30%	30% s/d 50%	Lebih dari 50%	3

	5	Total biaya operasional pendapatan jasa pinjaman	48,78%	Kurang dari 50%	50% s/d 75%	Lebih dari 75%	3
	6	Total biaya terhadap total pendapatan	48,72%	Kurang dari 60%	60% s/d 80%	Lebih dari 80%	3
Rasio Laba/ Surplus	7	Laba/surplus operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman	9,06%	Lebih dari 20%	10% s/d 20%	Kurang dari 10%	1
	8	Laba/surplus akhir terhadap rata-rata saldo pinjaman	9,09%	Lebih dari 10%	5% s/d 10%	Kurang dari 5%	2
	9	Laba/surplus operasional terhadap total pendapatan	51,27%	Lebih dari 15%	10% s/d 15%	Kurang dari 10%	3
Rasio Efektifitas Pengelolaan	10	Rata-rata saldo kas terhadap rata-rata saldo pinjaman	0,06%	Kurang dari 3%	3% s/d 5%	Lebih dari 5%	3

Dana	11	Rata-rata saldo bnk terhadap rata-rata saldo pinjaman	0,83%	Kurang dari 10%	10% s/d 20%	Lebih dari 20%	3
	12	Nilai pembelian inventaris terhadap laba operasional dalam 1 tahun	13,80%	Kurang dari 80%	5% s/d 10%	Kurang dari 10%	1
Resiko Pinjaman	13	Resiko pinjaman dibagi pendapatan satu tahun	17,92%	Kurang dari 25%	25% s/d 50%	Lebih dari 50%	3
	14	Realisasi biaya penghapusan terhadap resiko pinjaman	3,26%	Kurang dari 25%	25% s/d 50%	Kurang dari 50%	3
	15	Realisasi biaya penghapusan pinjaman terhadap pendapatan	18,19%	Kurang dari 5%	5% s/d 80%	Kurang dari 10%	1
Alokasi	16	Alokasi tambahan	30,14%	Lebih dari	25% s/d	Kurang dari	2

Keuntungan		modal terhadap keuntungan		50%	50%	25%	
		Total Nilai					37

4. Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman

Lembar penilaian aspek pengelolaan pinjaman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13

Lembar Penilaian Aspek Pengelolaan Pinjaman

Aspek Penilaian			Rasio	Baik	Cukup	Kurang	Nilai
				Nilai = 3	Nilai = 2	Nilai = 1	
Hasil Pengelolaan	1	Pertumbuhan permodalan per tahun	1,03%	Lebih dari 10%	5% s/d 10%	Kurang dari 5%	1
	2	Pertumbuhan jumlah kelompok	1,29%	Lebih dari 10%	5% s/d 10%	Kurang dari 5%	1
	3	Tingkat pengembalian	51,65%	Lebih dari 80%	60% s/d 80%	Kurang dari 60%	1
	4	Resiko pinjaman/kolektibilitas pinjaman	2,19%	Sampai dengan 20%	20% s/d 40%	Lebih dari 40%	3

	Total Nilai	6
--	--------------------	----------

5. Nilai Kesehatan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)

Lembar penilaian kesehatan UPK Batu Batikam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14

Lembar Nilai Kesehatan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)

Aspek Penilaian	Total nilai (a)	Nilai Maksimal (b)	Nilai Konversi $c = (a/b) \times 100$	Bobot Penilaian (d)	Nilai Akhir $e = c \times d$
Penilaian Pengelolaan Keuangan	37	48	77,08	50 %	38,52
Penilaian Pengelolaan Pinjaman	6	12	50	50 %	25
	Nilai Kesehatan				63,54

6. Lembar Kategori Kesehatan UPK

Lembar kategori kesehatan UPK Batu Batikam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15

Lembar Kategori Kesehatan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)

Kategori	Nilai Aspek
Sehat	Lebih dari 75
Cukup Sehat	Antara 60 s/d 75
Tidak Sehat	Kurang dari 60

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kesehatan UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 adalah cukup sehat dengan nilai kesehatan sebesar 63,54. Dapat dilihat dari lembar penilaian aspek pengelolaan keuangan bahwasanya total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman memiliki nilai kurang dengan rasio sebesar 17,69%. Untuk rasio laba, laba operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman memiliki nilai kurang dengan rasio sebesar 9,06%, sedangkan untuk rasio efektivitas pengelolaan dana, nilai pembelian inventaris terhadap laba operasional dalam 1 tahun memiliki nilai kurang dengan rasio sebesar 13,80% dan untuk resiko pinjaman, realisasi biaya penghapusan pinjaman terhadap pendapatan memiliki nilai kurang dengan rasio sebesar 18,19%.

Selanjutnya untuk lembar penilaian aspek pengelolaan pinjaman bahwasanya pertumbuhan permodalan per tahun memiliki nilai kurang dengan rasio sebesar 1,03%, sedangkan untuk pertumbuhan jumlah kelompok memiliki nilai kurang dengan rasio sebesar 1,29% dan untuk tingkat pengembalian memiliki nilai kurang dengan rasio sebesar 51,65%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap laporan keuangan pada UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Pengelolaan Keuangan

a. Rasio Pendapatan

Pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan cukup. Hal ini dilihat dari pendapatan jasa pinjaman dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan.

Total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan kurang. Hal ini dilihat dari pendapatan jasa pinjaman dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan sedangkan pada pendapatan non operasionalnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

b. Rasio Biaya

Biaya operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan kondisi pengelolaan biaya pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Batu Batikam dalam kondisi baik.

Total biaya terhadap rata-rata saldo pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan kondisi pengelolaan biaya pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Batu Batikam dalam kondisi baik.

Total biaya operasional terhadap pendapatan jasa pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan kondisi

pengelolaan biaya pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Batu Batikam dalam kondisi yang baik.

Total biaya terhadap total pendapatan pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan kondisi pengelolaan biaya pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Batu Batikam dalam kondisi yang baik.

c. Rasio Laba/Surplus

Laba/surplus operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan kurang. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya dalam menghasilkan laba.

Laba/surplus akhir terhadap rata-rata saldo pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan cukup. Hal ini menunjukkan cukup efektifnya dalam menghasilkan laba.

Laba/surplus akhir terhadap total pendapatan pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan sudah efektif dalam menghasilkan laba.

d. Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana

Rata-rata saldo kas terhadap rata-rata saldo pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dananya dalam kondisi baik.

Rata-rata saldo bank terhadap rata-rata saldo pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dananya dalam kondisi baik.

Nilai pembelian inventaris terhadap laba operasional pada tahun 2017 di kategorikan kurang. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dalam pembelian inventaris.

e. Rasio Risiko Pinjaman

Pendapatan dibandingkan dengan risiko pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan risiko pinjaman dalam kondisi baik.

Realisasi biaya penghapusan dibandingkan dengan resiko pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan resiko pinjaman dalam kondisi baik.

Realisasi biaya penghapusan dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2017 di kategorikan kurang. Hal ini menunjukkan resiko pinjaman dalam kondisi kurang.

f. Rasio Alokasi Keuntungan

Alokasi tambahan modal terhadap keuntungan pada tahun 2017 di kategorikan cukup. Hal ini menunjukkan alokasi keuntungan dalam kondisi yang cukup.

2. Aspek Pengelolaan Pinjaman

a. Rasio Pertumbuhan Permodalan

Saldo pinjaman ditambah dana perguliran terhadap pinjaman dana perguliran tahun lalu pada tahun 2017 di kategorikan kurang. Hal ini menunjukkan pertumbuhan permodalan dalam kondisi yang kurang .

b. Rasio Pertumbuhan Kelompok

Jumlah kelompok peminjam terhadap jumlah kelompok peminjam tahun lalu pada tahun 2017 di kategorikan kurang. Hal ini menunjukkan pertumbuhan kelompok dalam kondisi yang kurang.

c. Rasio Tingkat Pengembalian

Total pinjaman terhadap pengembalian pinjaman pada tahun 2017 di kategorikan kurang. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian dalam kondisi yang kurang.

d. Rasio Resiko Pinjaman

Total tunggakan diatas 6 bulan terhadap total saldo pinjaman pembiayaan pada tahun 2017 di kategorikan baik. Hal ini menunjukkan resiko pinjaman dalam kondisi yang baik.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi terhadap Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Batu Batikam, bagi penulis sendiri dan bagi penelitian selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian mengenai analisis rasio keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, baik/ buruknya keuangan ditentukan oleh kinerja keuangan, kinerja keuangan dihitung menggunakan rasio keuangan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa kinerja keuangan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Batu Batikam yang mana dilihat dari 2 aspek yaitu aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan pinjaman berada dalam nilai yang cukup sehat.

Untuk itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Batu Batikam diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman
2. Meningkatkan laba operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman
3. Meningkatkan nilai pembelian inventaris terhadap laba operasional dalam 1 tahun
4. Meningkatkan realisasi biaya penghapusan pinjaman terhadap pendapatan
5. Meningkatkan pertumbuhan permodalan pertahun
6. Meningkatkan pertumbuhan jumlah kelompok
7. Meningkatkan tingkat pengembalian

C. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dengan menganalisis kinerja keuangan pada UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tahun 2017, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya rasio pendapatan untuk UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum yang kurang ditingkatkan menjadi baik yaitu dengan cara meningkatkan jumlah pendapatan dan menurunkan saldo pinjaman.
2. Sebaiknya rasio laba/surplus untuk UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum yang kurang ditingkatkan menjadi baik yaitu dengan cara meningkatkan laba/surplus akhir dan menurunkan saldo pinjaman.
3. Sebaiknya efektivitas pengelolaan untuk UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum yang kurang ditingkatkan lagi yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap ketua unit pengelolaan kegiatan dalam pembelian inventaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. *Pengelolaan Dana Bergulir*. Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan.
- DSAK IAI. 2014 . *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : Grha Akuntan.
- Fahmi, Irham. (2013). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap ,Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Kasmir.2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Kemertian Dalam Negeri. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Kemertian Dalam Negeri. 2012. *Petunjuk Teknis Operasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Keputusan Menteri Koperasi Dan UKM no: 14/per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah No:20/per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan UPK
- Lestari, Sri. 2016. *Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombang*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Margareta, Farah. 2011. *Manajemen Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, Sri. Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Selemba Empat

- Nuryaman. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Putra D. *Informasi Penyajian Laporan Keuangan pada UPK Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum*, Wawancara, 28 Mei 2018
- Rahman, Putra. 2013. *Pengantar Akuntansi I*. Makasar: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Rivai, Veithzal. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sadeli, Lili M. 2011. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Samryn. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metodo Penelitian Manajemen Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, Lukman. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.